

Menguatkan Gerakan Masyarakat Sipil yang Terhubung & Berkelanjutan

Pulau Sumba

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Regio Pulau Sumba
2026



Civic Engagement Alliance
2026



Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis

Pulau Sumba merupakan salah satu dari tiga pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua lainnya adalah Pulau Flores dan Pulau Timor. Pulau Sumba dulunya dikenal sebagai Pulau Cendana karena terkenal sebagai penghasil kayu cendana. Namun, sebutan yang masih familiar saat ini yaitu Tana Humba dan Tanah Marapu. Konon, Humba berasal dari nama nenek moyang pertama yang datang ke pulau dan Marapu mengacu pada kepercayaan asli suku Sumba.

Sumba awalnya terbagi menjadi dua kabupaten, yakni Sumba Timur dan Sumba Barat. Sekarang sudah pemekaran menjadi empat kabupaten, diantaranya Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Setiap kabupaten memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi bukan berarti tanpa kesamaan. Sehingga, kearifan lokalnya begitu kuat.¹ Dengan kondisi geografis di Sumba, sektor ekonomi didominasi pada sektor pertanian. Sektor pendukung lainnya yang tak kalah, diantaranya peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan lainnya.² Jika dalam kacamata statistik data BPS, empat kabupaten di Pulau Sumba memiliki persentase kemiskinan yang tinggi sekitar 25-29%.³

Pada konteks lingkungan, Sumba dianggap representasi savana terbesar di Indonesia. Savana menjadi salah satu ekosistem yang diharapkan masuk ekosistem esensial yang dilindungi seperti gambut, karst, mangrove, dan lainnya. Misalnya di Sumba Timur, hampir setengah wilayahnya merupakan padang savana. Penampakan padang rumput ini berperan penting dalam penyerapan karbon seperti halnya gambut atau lahan basah. Sayangnya, lambat laun Sumba juga dihadapkan dengan investasi besar seperti pabrik tebu yang memiliki konsesi luas 52 ribu hektare setara lima persen luas pulau dan penambangan emas ilegal di wilayah Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti, Sumba Timur. Selain itu, terdapat

¹ Explore Sumba, "Wilayah dan Kota di Pulau Sumba", <https://exploresumba.com/id/pulau-sumba-indonesia/wilayah-dan-kota/>, diakses 15 Juni 2026; Rusmasiela M.P., "Pulau Sumba: Asal-usul, Geografis, Fakta Menarik, dan Ciri Khas", 26 April 2024, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7311799/pulau-sumba-asal-usul-geografis-fakta-menarik-dan-ciri-khas>, diakses 15 Juni 2026; _____, *Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024* (Kupang: DPMPTSP NTT, 2024)

² Muhammad Erdi Lazuardi, dkk., *Survei Biofisik dan Sosial Ekonomi di Selatan, Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Bali: Coral Triangle Center, 2014), hal. 41-42

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2025", 5 Februari 2026, <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWwTISZDNabVFUMDkiMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur--2024.html>, diakses 15 Juni 2026

juga isu-isu krusial lain berkaitan dengan kontrol atas sumber daya alam, diantaranya alih fungsi lahan, pangan, persoalan masyarakat adat.

Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil & Keterlibatan Masyarakat Sipil

Pertemuan konsolidasi masyarakat sipil di Pulau Sumba merupakan rangkaian konsolidasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pertemuan ini menjadi pertemuan yang kedua setelah Pulau Timor, Rote, dan Sabu (TIROSA) sekaligus Alor. Konsolidasi masyarakat sipil Pulau Sumba akan melengkapi potret lanskap situasi ruang sipil dan keterlibatan sipil di Provinsi NTT.

Konsolidasi dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2026. Peserta yang terlibat sejumlah 24 orang dengan komposisi 11 perempuan dan 13 laki-laki. Jumlah itu berasal dari 17 organisasi. Konteks penguatan masyarakat Pulau Sumba tidak hanya menjadi fokus dari OMS yang berada di Sumba – termasuk keterlibatannya dalam konsolidasi ini, tetapi juga OMS yang ada di wilayah lain seperti Kupang atau Timor. Meskipun menjadi kepentingan beberapa wilayah, andil OMS di Sumba sangat penting untuk memahami kompleksitas persoalan Sumba.



Gambar.1 Peta Membaca Konteks Pulau Tiroso

Sebelum konsolidasi secara luring, konsolidasi dilakukan secara daring terlebih dahulu. Ini untuk mendiskusikan urgensi masyarakat sipil berkumpul untuk merefleksikan kembali gerakan masyarakat sipil Pulau Sumba. Ketika konsolidasi secara daring atau luring, masyarakat sipil membaca konteks persoalan di Sumba. Beberapa temuannya, sebaran isu dominan dan tersebar di semua wilayah adalah lingkungan dan SDA. Namun, di

Sumba Barat sendiri terdapat isu dominan lain berupa pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut tidak diikuti dengan sebaran wilayah kerja OMS. Kepadatan wilayah kerja terdapat di wilayah barat karena pertimbangan fasilitas dianggap lebih banyak opsi. Implikasinya, timbul ketimpangan atau kesenjangan sumberdaya untuk mendukung kerja-kerja di wilayah timur dan tengah.

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan di Sumbagsel

Penilaian, eksplorasi, dan refleksi berbasis CIVICA di Pulau Tiroso membuka gambaran tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil. Gambaran singkat dari refleksi terhadap tujuh dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut:

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Sumba berupaya mengurai stigma negatif seperti mendukung dunia gelap, penambang krisis, makan dari kasus, jual kemiskinan, dll. Masyarakat sipil menghadapinya dengan konsisten bekerja sesuai visi lembaga, melahirkan champion di basis untuk menjaga keberlanjutan dan kepemimpinan di komunitas, serta praktik-praktik baik di tingkat komunitas lainnya untuk membangun kepercayaan. Meskipun kapasitas pengorganisasian basis masih tergolong kuat, tantangan besar yang muncul

terletak pada keberlanjutan dukungan sumber daya seperti realokasi dana desa dan dipengaruhi oleh kolaborasi. Selain itu, terdapat situasi lemahnya dokumentasi terhadap berbagai cerita sukses di lapangan.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun sistem pengetahuan bersama pada kerja-kerja pengorganisasian yang mencakup:
 - a. Peta wilayah dampingan/basis/komunitas
 - b. Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh komunitas
2. Membangun model belajar peer to peer (antar komunitas Masyarakat)

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Beberapa upaya dilakukan untuk memperkuat pengetahuan OMS di Sumba. Upaya tersebut sebagai berikut: membuat forum-forum diskusi, pendidikan kader rakyat, serta aktivitas wadah terkait isu tambang dan SDA. Masyarakat sipil juga menginisiasi berbagi sumber daya antarorganisasi untuk saling dukung satu sama lain berbasis kebutuhan masing-masing OMS. Hal tersebut menunjang kerja-kerja advokasi yang sudah dilakukan berbasis data. Penguatan itu turut dilakukan melalui upaya membangun keamanan, baik kebijakan internal dan kesadaran. Tantangannya terdapat pada sistem pengelolaan pengetahuan dan data yang belum merata dan dikelola bersama serta lemahnya dokumentasi praktik-praktik baik yang dilakukan OMS.

Rekomendasi Prioritas

1. Penting adanya sistem penyelarasan dan sharing data. Pengetahuan bersama sesama OMS melalui kanal yang dikelola bersama untuk agenda-agenda bersama OMS.
2. Pendokumentasian praktik-praktik baik sebagai pembelajaran bersama dan alat (bahan) komunikasi kepada para pihak.

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Kehadiran generasi baru turut memperkaya pendekatan advokasi, terutama penggunaan media sosial. Yang perlu dipikirkan bagaimana menjaga daya tahan dan orientasi aktivis-aktivis muda dalam berorganisasi. Meskipun media sosial ini penting, OMS Sumba

memiliki terkadang mengalami hambatan perihal jaringan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap berbagai komunikasi yang membutuhkan internet, seperti komunikasi regio dan nasional. Tantangan lain yang dihadapi di Sumba adalah belum tersedianya database bersama mengenai profil dan kepakaran OMS dan bergantung pada akses atau kemampuan personal. OMS di Sumba juga dihadapkan dengan kegelisahan tentang agenda riset dari OMS Nasional yang tidak disertai tanggung jawab untuk mengembangkan risetnya untuk kebutuhan Sumba.

Rekomendasi Prioritas

1. Menemukan nilai bersama yang mampu menghubungkan lintas organisasi, lintas generasi, dan lintas isu sebagai jembatan konektivitas dalam gerakan masyarakat sipil Sumba. Tentu, tetap aktif terhadap perkembangan dan tetap berpijak pada kekuatan lokal.
2. Merujuk pada bacaan kontek untuk lanskap Sumba, ada 3 isu pengikat konektivitas di sumba: masyarakat adat, pangan dan alih fungsi lahan. Kontrol masyarakat sipil dalam pengelolaan SDA.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Aksi-aksi kolaboratif OMS di Sumba terkait pendanaan dilakukan ketika terdapat agenda bersama seperti respons kasus atau menyelenggarakan event. Upaya pengembangan sumber daya alternatif melalui praktik donasi dari fee individu di lembaga serta mengembangkan unit usaha seperti produksi kopi, bakso ikan, hingga catering. Kebutuhan di unit usaha yaitu sarana pemasaran bersama yang mendukung ekosistem usaha masyarakat sipil. Dalam konteks dukungan donor, OMS di Sumba bertumpu dengan nilai dan visi misi organisasi untuk berelasi dengan donor. Bahkan, beberapa OMS melakukan mapping donor sebagai basis penentuan pilihan sumber pendanaan. Meskipun dengan memosisikan diri semacam itu, masyarakat sipil merasa akses cenderung tetap lebih mudah.

Rekomendasi Prioritas

1. Membangun unit usaha yang saling mengkoneksikan (prinsip local to local sebagai rantai pasar dan rantai nilai) antar OMS dan OMS dengan komunitas.
2. Peningkatan kapasitas OMS dalam pembuatan proposal yang potensial melalui ruang berbagi bersama OMS Sumba.

Dimensi Regulasi Pendukung

Ekosistem masyarakat sipil di Sumba didukung oleh sejumlah regulasi yang mengakomodir masyarakat adat, lingkungan, desa, perlindungan perempuan dan anak, dll. Sebagian regulasi tersebut lahir dari upaya advokasi masyarakat sipil di tingkat lokal hingga nasional. Regulasi-regulasi itu tidak semuanya berjalan mulus karena salah satunya kemauan atau kepentingan aparat penegak hukum (APH). Implementasi terkadang malah lebih condong pemberian keleluasaan bagi kepentingan investasi. Situasi tersebut beriringan dengan situasi kapasitas OMS yang terbatas dalam melakukan monitoring implementasi regulasi. Kondisi semakin parah ketika menguatnya oligarki dan militerisme serta sentralisasi kebijakan. Meski demikian, mulai tumbuh kesadaran untuk melakukan kolaborasi advokasi kebijakan antarorganisasi dan inklusif.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Ruang konsolidasi gerakan di Sumba terjadi melalui praktik-praktik aksi kolektif untuk seruan solidaritas, respons kebencanaan, dan Festival Wai Humba. Aksi-aksi tersebut diperkokoh dengan narasi lokal yang kuat. Narasi yang dimaksud, diantaranya “tapunang” sebagai spirit untuk menggerakkan konektivitas, “hamayang” sebagai ritual penting dalam advokasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan menyebut hutan layaknya tempat turunnya air dari langit dan tempat naiknya minyak dari tanah. Beragam praktik menarik ini sayangnya belum sepenuhnya didukung oleh proses refleksi dan pembelajaran bersama yang terstruktur untuk memperkuat strategi gerakan ke depan.

Rekomendasi Prioritas

1. Menghidupkan ruang kajian kebijakan bersama di masyarakat sipil sumba terkait regulasi yang menjadi ancaman bersama dengan beragam perspektif dan memproduksi hasil kajian yang dapat jadi dokumen advokasi regulasi bersama (policy brief, legal opinion, dll)
2. Menghidupkan aksi-aksi kolektif yang sudah ada seperti Festival Wai Humba dengan pendekatan yang lebih menunjukkan kepentingan kolektif masyarakat sipil dan narasi Sumba yang kuat.

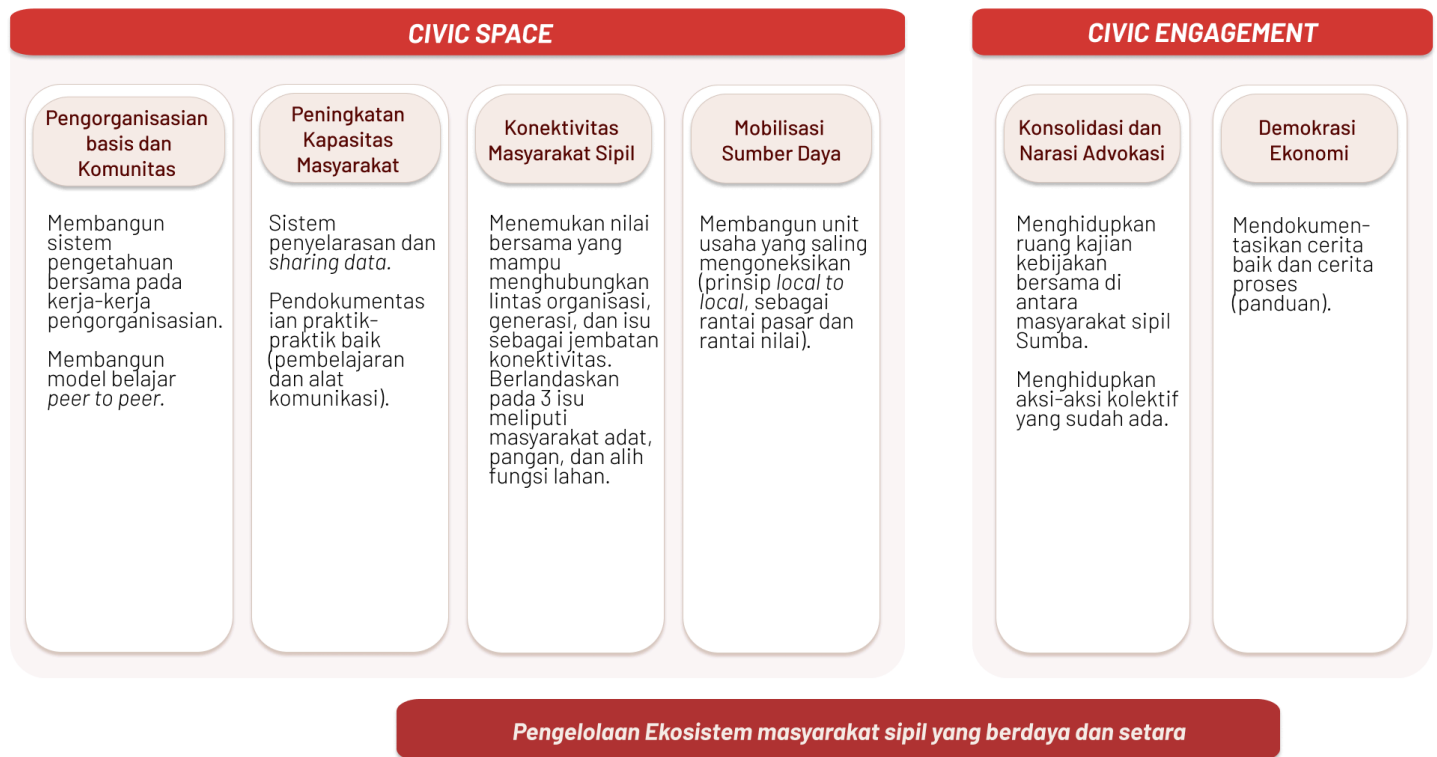
Dimensi Demokrasi Ekonomi

Refleksi terhadap kondisi demokrasi ekonomi di level komunitas belum cukup terpetakan dalam refleksi yang dilakukan. Walau begitu, beberapa organisasi telah memulai inisiatif

untuk pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan sumberdaya tempatan namun masih dalam tahap yang sangat awal.

Sintesis Penilaian CIVICA Pulau Sumba

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan publik menghasilkan rangkuman rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 2. Sintesis Penilaian CIVICA Pulau Sumba

Kesimpulan

Refleksi masyarakat sipil di Pulau Sumba menunjukkan bahwa ruang sipil ditopang oleh beragam aspek. Misalnya, kapasitas pengorganisasian yang kuat dan tradisi solidaritas yang hidup. Aspek penopang lainnya terdapat keberagaman inisiatif masyarakat dalam merespons isu-isu lingkungan, sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan komunitas. Berbagai praktik kolaborasi menjadi modal penting untuk merawat keberlanjutan partisipasi publik dan memperkuat posisi masyarakat sipil di tengah berbagai tantangan yang ada dan terus berkembang. Contoh tantangan tersebut adalah lemahnya pengelolaan pengetahuan bersama, kebijakan dan APH yang tidak pro kepentingan masyarakat, dan sumberdaya masyarakat sipil yang terbatas.

Sebagai langkah strategis ke depan, masyarakat sipil Sumba sepakat untuk memperkuat konektivitas dan menjaga keberlanjutan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut: penguatan kolaborasi lintas, peningkatan kapasitas secara kolektif, membangun dokumentasi bersama, dan mengembangkan aksi-aksi kolektif yang ada. Dari semua pokok-pokok yang dibahas, konsolidasi ini diakhiri dengan penetapan tujuh orang focal point yang mewakili empat kabupaten di Sumba.